



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYARMADANI
2. Jabatan : SEKRETARIS DKPP
3. NHK : 671960

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.910.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/320 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , Rp. 1.700.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 69 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000		
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 4.216 m2/24 m2 di KAB / KOTA BENGKULU TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 16.961 m2/91 m2 di KAB / KOTA BENGKULU TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
6. Tanah Seluas 1.042 m2 di KAB / KOTA BENGKULU TENGAH, HASIL SENDIRI , Rp. 50.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	130.000.000
1. MOBIL, TOYOTA SIENTA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	25.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	450.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	113.595.996
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.628.595.996



III. HUTANG

Rp. 149.626.612

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.478.969.384

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.